2022 *PERUBAHAN RENCANA KERJA*

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN BANGKA

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka tahun 2022 dapat diselesaikan .

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dalam rangka mengakomodir perkembangan dan perubahan dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2022 yang telah disusun sebelumnya memberikan acuan dalam menjalankan urusan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen Rencana Kerja Perubahan diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

Perubahan Rencana Kerja ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan dalam penyajiannya maupun penyusunannya, oleh karena itu saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu dalam membuka wawasan sehingga pada saatnya akan dapat memperbaiki kinerja serta penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sungailiat, Juni 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bangka,

Drs. M. DALYAN AMRIE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN …….....…..….....……	I - 1
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN……	II - 1
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……..……...……	III - 1
BAB IV	PENUTUP …….....…….....……	IV - 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka. Renstra Dinas Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2023 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2022.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Trwiulan II Tahun berjalan. Tahapan penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);

25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 52).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan perubahan program/kegiatan Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2022. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2022 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 Lingkup Dinpemdes Kabupaten Bangka..

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2022 sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinpemdes Kabupaten Bangka Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan evaluasi terhadap kinerja keuangan Dinpemdes Kabupaten Bangka sampai dengan Semester I tahun 2022.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpemdes Kabupaten Bangka Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2022) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023	
1	2	4	5	6		7		B		10			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			24.893.281.545		-		9.233.180.165			2.265.060.330			3.000.225.578		12.493.014.174		50,19
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	24,00	13.866.953.145		-	22,00	4.622.317.715	0,00		1.657.476.710	0,00		2.109.303.434	0	2.109.303.434	0,00	15,21
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	12,00				10,00		0,00			0,00			0		0,00	
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00				0,00		0,00			0,00			0		0,00	
			Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	64,76				64,56		0,00			0,00			0		0,00	

			Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	**1,95**				**1,75**		**0,00**			**0,00**			**0**		**0,00**	
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	**70,00**				**60,00**		**0,00**			**0,00**			**0**		**0,00**	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)**	**100**	**97.009.500**			**100**	**32.336.500**	**0,00**		**5.920.000**	**0,00**		**5.920.000**	**0**	**97.207.800**	**0,00**	
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	**100**				**100**		**50,00**			**50,00**			**0**		**0,00**	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dok)	21	47.130.300	7	51.192.800	7	15.710.100	0,00			0,00	0	-	7	51.192.800	33,33	108,62
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun (laporan)	60	49.879.200	20	40.095.000	20	16.626.400	50,00	10,00	5.920.000	50,00	10	5.920.000	30	46.015.000	50,00	92,25
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)**	**100**	**10.648.311.900**			**100**	**3.549.437.300**	**25,00**		**1.286.373.433**	**50,00**		**1.691.348.318**	**0**	**9.552.303.241**	**0,00**	
			Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (%)	**100**				**100**		**25,00**			**50,00**			**0**		**0,00**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji an Tunjangan ASN yang tertangani	42	10.648.311.900	14	7.860.954.923	14	3.549.437.300	28,57	4,00	1.286.373.433	50,00	7	1.691.348.318	21	9.552.303.241	50,00	89,71

			(bulan)															
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)**	**56,25**	**29.400.000**			**18,75**	**9.800.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0**	**-**	**0,00**	
			Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0**		**0,00**	
			Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0**		**0,00**	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia (stell)	219	29.400.000	-	-	57,00	9.800.000	0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
			Jumlah pakaian olah raga yang tersedia (stell)	48	-	-	-	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	
			Jumlah pakaian pawai adat yang tersedia (stell)	171	-	-	-	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	30	-	-	-	0,00	-	0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100**	**589.687.695**			**100**	**196.562.565**	**25,00**		**69.424.100**	**50,00**		**5.680.000**	**0**	**64.237.600**	**0,00**	

		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani (bulan)	36	53.670.000	12	58.557.600	12	17.890.000	25,00	3,00	5.680.000	50,00	6	5.680.000	18	64.237.600	50,00	119,69
			Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani (bulan)	36	536.017.695	12	176.857.290	12	178.672.565	25,00	3,00	63.744.100	50,00	6	85.759.400	18	262.616.690	50,00	48,99
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**40,00**	**-**			**20,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0**	**66.970.000**	**0,00**	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	3	-	1	66.970.000	0	-	0,00			0,00	0	-	1	66.970.000	33,33	0,00
			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)		-	-	-	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan (paket)	3	-	-	-	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang diadakan (unit)	1	-	-	-	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atas bangunan lainnya	Jumlah Bangunan gedung Kantor yang diadakan (unit)	1	-	-	-	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)**	**100**	**2.030.854.050**			**100**	**676.951.350**	**25,00**		**260.364.417**	**50,00**		**357.059.166**	**0**	**1.536.119.050**	**0,00**	

			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (layanan)	**9**				**3**		**3,00**			**3,00**			**0**		**0,00**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani (bulan)	36	1.607.108.250	12	998.291.053	12	535.702.750	25,00	3,00	220.413.680	50,00	6	296.548.315	18	1.294.839.368	50,00	80,57
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet, air dan listrik yang tertangani (bulan)	36	305.375.400	12	111.206.909	12	101.791.800	25,00	3,00	27.678.357	50,00	6	43.657.876	18	154.864.785	50,00	50,71
			Jumlah layanan updating website yang tertangani (bulan)	36	-	12	-	12		25,00	3,00		50,00	6		18		50,00	
			Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang tertangani (bulan)	36	-	12	-	12		25,00	3,00		50,00	6		18		50,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani (bulan)	36	118.370.400	12	69.561.922	12	39.456.800	25,00	3,00	12.272.380	50,00	6	16.852.975	18	86.414.897	50,00	73,00
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**70,00**	**471.690.000**			**60,00**	**157.230.000,00**	**0,00**		**35.394.760**	**0,00**		**49.295.950**	**0**	**362.973.208,00**	**0,00**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	9	405.000.000	3	300.767.258	3	135.000.000	33,33	1,00	35.394.760	66,67	2	49.295.950	5	350.063.208	55,56	86,44

		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	3	21.690.000	1	12.910.000	1	7.230.000	0			0	0	-	1	12.910.000	33,33	59,52
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	45.000.000	-	-	1	15.000.000	0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										**16,88**		**35,86**	**30,39**		**45,63**			**25,23**	**15,21**
Predikat Kinerja										**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**
2	**Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi yang baik (%)**	**100**	**342.918.000**			**80,00**	**114.306.000**	**0,00**		**17.109.100**	**0,00**		**21.349.100**	**0**	**79.802.600**	**0,00**	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahanan Desa		**Persentase Desa Kategori Cepat Berkembang (%)**																
			Persentase Kemandirian Desa (%)																
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	**Persentase Desa yang tertata dengan Baik (%)**	**100**	**342.918.000**			**80,00**	**114.306.000**	**40,00**		**17.109.100**	**40,00**		**21.349.100**	**0**	**79.802.600**	**0,00**	

		Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang batasnya ditetapkan	10	342.918.000	2	52.853.500	10	114.306.000	30,00	3,00	17.109.100	50,00	5	21.349.100	7	74.202.600	70,00	21,64
			Jumlah Desa/Lingkungan yang dimekarkan	4	-	0	-	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang tertata Wilayahnya	6	-	2	5.600.000	0	-	0,00			0,00	0	-	2	5.600.000	33,33	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										**10,00**		**14,97**	**16,67**		**18,68**			**34,44**	**10,82**
Predikat Kinerja										**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**
3	**Meningkatnya Kinerja Pemerintahanan Desa**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel**	**100**	**4.330.160.400**			**100**	**1.443.386.800**	**0,00**		**588.467.920**	**0,00**		**867.566.444**	**0**	**8.364.682.987**		**193,17**
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel (%)**	**100**	**4.330.160.400**			**100**	**1.443.386.800**	**0,00**		**588.467.920**	**0,00**		**867.566.444**	**0**	**8.364.682.987**		**193,17**
			Persentase BUMDesa yang aktif (%)																
			Jumlah unit Usaha Bersama yang dibentuk (unit)																
			Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai baik (%)																
			Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap an up																

			to date (%)																
			Persentase Desa yang Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Sesuai Ketentuan (%)																
			Persentase Tingkat Partipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD (%)																
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa	Jumlah Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun	2	3.544.040.100	2	1.453.251.800	2	1.181.346.700	50	1,00	559.846.320	50,00	1	838.944.844	3	2.292.196.644	150,00	64,68
		Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pengadaan Barang/jasa secara swakelola	184	-	60	4.324.603.693	0	-	0			0,00	0	-	60	4.324.603.693	32,61	0,00
		Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	62	56.646.000	62	22.238.200	62	18.882.000	32	20,00	5.555.200	32,26	20	5.555.200	82	27.793.400	132,26	49,07
		Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pembinaan Unit Usaha Bersama	62	372.942.000	62	62.444.200	62	124.314.000	32,26	20,00	14.780.000	32,26	20	14.780.000	82	77.224.200	132,26	20,71
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	Jumlah sosialisasi Pilkades	62	-	44	1.599.289.050	0	-	0,00			0,00	0	-	44	1.599.289.050	70,97	0,00

		Kepala Desa																	
			Jumlah Kades yang dilantik	62	-	20	-	20		0,00			0,00	0	-	20	-	32,26	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Profil Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyusun profil desa/kelurahan (e-govern)	62	55.320.000	31	35.289.600	62	18.440.000	25,81	16,00	8.286.400	25,81	16	8.286.400	47	43.576.000	75,81	78,77
		Sub Kegiatan Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Aset Desa	62	113.067.300	0	-	31	37.689.100	32,26	10,00	7.620.000	32,26	10	7.620.000	10	7.620.000	16,13	6,74
		Sub Kegiatan Pembinaan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Bimbingan	168	-	0	-	44		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	#DIV/0!
		Sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan terbaik	8	188.145.000	0	-	8	62.715.000	25,00	2,00	11.249.400	25,00	2	11.249.400	2	11.249.400	25,00	5,98
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										**19,76**		**40,77**	**19,76**		**60,11**			**66,73**	**193,17**
Predikat Kinerja										**SR**		**SR**	**SR**		**R**			**S**	**ST**
4	**Meningkatnya Kinerja Pemerintahanan Desa**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif**	**70,00**	**6.353.250.000**			**50,00**	**3.053.169.650**	**16,13**		**2.006.600**	**16,13**		**2.006.600**	**72**	**1.939.225.153**		**30,52**
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	**Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat**	**70**	**6.353.250.000**			**50,00**	**3.053.169.650**	**16,13**		**2.006.600**	**16,13**		**2.006.600**	**72**	**1.939.225.153**		**30,52**

		Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Persentase Sarjana Membangun Desa yang aktif																
			Persentase Kelembagaan Masyrakat yang dibina																
			Persentase PKK Desa/Keluraha n yang aktif																
			Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan BBGRM (%)																
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan, Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarkatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	62	109.890.000	62	1.937.2 18.553	62	36.63 0.000	16,13	10,0 0	2.006.600	16,13	10	2.006.600	72	1.939.225.153	116,1 3	1764,7 0

		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarjana Membangun Desa (SMD)	62	6.059.220.000	62	127.193.800	62	2.019.740.000	24,19	15,00	807.040.235	48	30	1.106.389.255	92	1.233.583.055	148,39	20,36
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tetap Guna	Jumlah TTG (Teknologi Tepat Guna) yang Dilombakan	9	184.140.000	0	-	3,00	61.380.000	33,33	1,00	6.660.000	66,67	2,00	7.890.000	2,00	7.890.000	22,22	4,28
		Sub Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah BBGRM	1	-	0	-	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
		Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan PKK Desa /Kelurahan yang dilaksakan	81	2.806.258.950	0	-	81,00	935.419.650	27,16	22,00	252.768.330	51,85	42,00	302.368.445	42,00	302.368.445	51,85	10,77
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										**20,16**		**0,07**	**32,26**		**0,07**			**132,26**	**30,52**
Predikat Kinerja										**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**ST**	**SR**
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									**9.233.180.165**			**2.265.060.330**			**3.000.225.578**		**12.493.014.174**		
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (%)										**16,70**		**24,53**	**24,77**		**32,49**			**64,67**	**50,19**
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**R**	**R**

Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ialah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka pada Tahun 2022 memiliki 4 Program 8 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yang sampai akhir Triwulan II masih belum ada yang berhasil tercapai target kinerja ataupun realisasi keuangannya. Namun diharapkan pada Triwulan selanjutnya hingga Triwulan IV dapat terealisasi secara maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun rata-rata tingkat Capaian Kinerja sampai Triwulan II adalah sebesar 20,16 % dengan predikat masih SR (Sangat Rendah)

Faktor Penghambat pada pelaksanaan kinerja sampai dengan triwulan II adalah banyaknya kegiatan dan sub kegiatan yang baru dapat dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan akhir, serta terjadinya pergeseran anggaran untuk beberapa kegiatan ke triwulan akhir.

Sedangkan untuk tindak lanjut pelaksanaan kinerja agar tercapai maksimal adalah dengan cara pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan per-triwulan.

2.2 Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka sampai dengan Semester 1 Tahun 2022

Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 disajikan pada table berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
			KEUANGAN	KEU (%)	
1	*2*	*3*	*11*	*12*	*13*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**32.336.500,00**	**5.920.000,00**		**26.416.500,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**15.710.100,00**	**-**		**15.710.100,00**
	Belanja Honorarium PPTK	450.000,00			450.000,00
	Belanja Barang Pakai Habis	1.850.100,00		-	1.850.100,00
	Belanja Lembur	13.410.000,00		-	13.410.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**16.626.400,00**	**5.920.000,00**	**35,61**	**10.706.400,00**

	Belanja Honorarium PPTK	450.000,00		-	450.000,00
	Belanja Barang Pakai Habis	1.387.300,00		-	1.387.300,00
	Belanja Lembur	9.600.000,00	5.920.000,00	61,67	3.680.000,00
	Belanja Perjalnaan Dinas Biasa	5.189.100,00		-	5.189.100,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.549.437.300,00**	**1.286.373.433,00**	**36,24**	**2.263.063.867,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**3.549.437.300,00**	**1.286.373.433,00**	**36,24**	**2.263.063.867,00**
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.697.437.300,00	952.378.433,00	35,31	1.745.058.867,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	852.000.000,00	333.995.000,00	39,20	518.005.000,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**9.800.000,00**	**-**	**-**	9.800.000,00
	Peangadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**9.800.000,00**	**-**	**-**	**9.800.000,00**
	Belanja Honorarium PPTK	150.000,00	-	-	150.000,00
	Belanja Pakaian Dinas	9.650.000,00	-	-	9.650.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**-**			**-**
	Belanja Honorarium PPTK	-	-	-	-
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**196.562.565,00**	**69.424.100,00**	**35,32**	**127.138.465,00**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**196.562.565,00**	**69.424.100,00**	**35,32**	**127.138.465,00**
	Belanja Honorarium PPTK	690.000,00	-	-	690.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	5.680.000,00	47,33	6.320.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.200.000,00		-	5.200.000,00
	Belanja Perjalnan Dinas Dalam Biasa	136.622.565,00	54.549.100,00	39,93	82.073.465,00

	Belanja Perjalnan Dinas Dalam Kota	42.050.000,00	9.195.000,00	21,87	32.855.000,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**	**-**	-	**-**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**-**	**-**		**-**
	Belanja Honorarium PPTK				
	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan				
	Belanja Modal Mebel				
	Belanja Modal Alat Pendingin				
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya				
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat				
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat				
	Belanja Modal Komputer				
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**676.951.350,00**	**260.364.417,00**		**416.586.933,00**
1	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**535.702.750,00**	**220.413.680,00**	**41,14**	**315.289.070,00**
	Belanja Honorarium PPTK	840.000,00		-	840.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	278.850.000,00	118.387.500,00	42,46	160.462.500,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	101.400.000,00	44.000.000,00	43,39	57.400.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.350.000,00	11.000.000,00	43,39	14.350.000,00
	Belanja Jasa Tenaga caraka	25.350.000,00	11.000.000,00	43,39	14.350.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	28.270.150,00	8.388.100,00	29,67	19.882.050,00
	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	100.000,00	20,00	400.000,00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	375.000,00	15,63	2.025.000,00
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	26.520.000,00	10.969.980,00	41,36	15.550.020,00

	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	784.584,00	323.064,00	41,18	461.520,00
	Belanja Premi Asuransi Kematian	19.615.416,00	8.076.936,00	41,18	11.538.480,00
	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	4.488.000,00	1.350.000,00	30,08	3.138.000,00
	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.449.000,00		-	1.449.000,00
	Belanja Bahan kertas dan cover	11.269.000,00	3.462.100,00	30,72	7.806.900,00
	Belanja Bahan Kantor Bahan komputer	8.616.600,00	2.981.000,00	34,60	5.635.600,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**101.791.800,00**	**27.678.357,00**	**0,27**	**74.113.443,00**
	Belanja Honorarium PPTK	600.000,00		-	600.000,00
	Belanja Alat Listrik & Elektronik	1.591.800,00		-	1.591.800,00
	Belanja Telepon	2.400.000,00	206.156,00	8,59	2.193.844,00
	Belanja Air	7.200.000,00	2.008.080,00	27,89	5.191.920,00
	Belanja Listrik	72.000.000,00	19.264.500,00	26,76	52.735.500,00
	Belanja Kawat/Faksimil/Insentif	18.000.000,00	6.199.621,00	34,44	11.800.379,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**39.456.800,00**	**12.272.380,00**	**31,10**	**27.184.420,00**
	Belanja Honorarium PPTK	450.000,00		-	450.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.350.000,00	11.000.000,00	43,39	14.350.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.296.800,00		-	10.296.800,00
	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	600.000,00	250.000,00	41,67	350.000,00
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.560.000,00	522.380,00	33,49	1.037.620,00
	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	46.152,00	19.230,00	41,67	26.922,00
	Belanja Premi Asuransi Kematian	1.153.848,00	480.770,00	41,67	673.078,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**157.230.000,00**	**35.394.760,00**	**0,23**	**121.835.240,00**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**135.000.000,00**	**35.394.760,00**	**0,26**	**99.605.240,00**
	Belanja Honorarium PPTK	690.000,00		-	690.000,00
	Belanja Jasa Sopir	53.100.000,00	23.000.000,00	43,31	30.100.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.120.000,00	1.044.760,00	33,49	2.075.240,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	92.304,00	38.460,00	41,67	53.844,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.307.696,00	961.540,00	41,67	1.346.156,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Dinas roda 4	73.330.000,00	10.350.000,00	14,11	62.980.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Dinas roda 2	2.360.000,00		-	2.360.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**7.230.000,00**	**-**	**-**	**7.230.000,00**
	Belanja Honorarium PPTK	450.000,00		-	450.000,00
	Belanja Js.Service Peralatan & Perlengkapan Kantor	6.780.000,00		-	6.780.000,00
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**15.000.000,00**	**-**	**-**	**15.000.000,00**
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
	PROGRAM PENATAAN DESA				-
	Kegiatan Penyelengaaraan Penataan Desa	**114.306.000,00**	**17.109.100,00**	**14,97**	**97.196.900,00**
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	**114.306.000,00**	**17.109.100,00**	**14,97**	**97.196.900,00**
	Belanja Honorarium PPTK	690.000,00		-	690.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.600,00	1.495.400,00	86,16	240.200,00
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	180.000,00	161.700,00	89,83	18.300,00
	Belanja Alat Bahan Komputer	159.000,00	132.000,00	83,02	27.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	4.000.000,00	40,00	6.000.000,00

	Belanja Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegaitan	10.900.000,00		-	10.900.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.121.400,00	3.640.000,00	14,49	21.481.400,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.520.000,00	7.680.000,00	11,72	57.840.000,00
					-
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	**-**			**-**
	Belanja Alat Tulis Kantor	-		-	-
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	-		-	-
	Belanja Bahan Cetak	-		-	-
	Belanja Bahan Kompute	-		-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-		-	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-		-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				-
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**1.319.072.800,00**	**592.557.320,00**	**44,92**	**726.515.480,00**
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	**1.181.346.700,00**	**559.846.320,00**	**47,39**	**621.500.380,00**
	Belanja Honorarium PPTK	960.000,00		-	960.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	9.662.600,00		-	9.662.600,00
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	660.000,00		-	660.000,00
	Belanja Bahan Komputer	106.000,00		-	106.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00		-	3.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-		-	-

	Belanja Iuran Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.143.657.600,00	550.966.320,00	48,18	592.691.280,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.575.500,00	3.280.000,00	31,02	7.295.500,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.125.000,00	5.600.000,00	46,19	6.525.000,00
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	**18.882.000,00**	**5.555.200,00**	**29,42**	**13.326.800,00**
	Belanja Honorarium PPTK	450.000,00		-	450.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	869.500,00	809.000,00	93,04	60.500,00
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	196.500,00	178.200,00	90,69	18.300,00
	Belanja Bahan Komputer	106.000,00	88.000,00	83,02	18.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00		-	800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00		-	5.450.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.050.000,00		-	2.050.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.960.000,00	4.480.000,00	50,00	4.480.000,00
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	**-**	**-**		**-**
	Belanja Honorarium PPTK				-
	Belanja Alat Tulis Kantor				-
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover				-
	Belanja Bahan Cetak				-
	Belanja Bahan Komputer				-
	Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya				-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				-
	Belanja Pkaian Dinas Upacara				-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				-
	Honorium Rohaniwan				-

	Belanja Jasa Pelayanan Umum				-
	Belanja Jasa Tenaga Ahli				-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor angkutan barang				-
	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat				-
	Belanja Sewa Peralatan studio audio				-
	Belanja Sewa Gedung / tempat Pertemuan				-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-
	Belanaj Jasa yang daiberikan pihak ketiga /pihak lain				-
	Fasilitasi Penyusunann Profil Desa	**18.440.000,00**	**8.286.400,00**	**44,94**	**10.153.600,00**
	Belanja Honorarium PPTK	450.000,00		-	450.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	190.400,00	147.400,00	77,42	43.000,00
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	296.800,00	258.500,00	87,10	38.300,00
	Belanja Bahan Komputer	556.500,00	390.500,00	70,17	166.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-		-	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-		-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.896.300,00	5.440.000,00	36,52	9.456.300,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	**37.689.100,00**	**7.620.000,00**	**20,22**	**30.069.100,00**
	Belanja Honorarium PPTK	450.000,00		-	450.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.807.950,00		-	1.807.950,00
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	600.000,00		-	600.000,00
	Belanja Bahan Komputer	106.000,00		-	106.000,00

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		-	3.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.000.000,00	4.100.000,00	18,64	17.900.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.725.150,00	3.520.000,00	36,19	6.205.150,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	**62.715.000,00**	**11.249.400,00**	**17,94**	**51.465.600,00**
	Belanja Honorarium PPTK	600.000,00		-	600.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	739.200,00	694.800,00	93,99	44.400,00
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	236.800,00	204.600,00	86,40	32.200,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00		-	7.300.000,00
	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	28.450.000,00		-	28.450.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.759.000,00	6.720.000,00	30,88	15.039.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				-
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lemabaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Kabupaten/Kota	**3.177.483.650,00**	**1.083.255.165,00**	**34,09**	**2.094.228.485,00**
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelutahan dan Masyarakat Hukum Adat	**36.630.000,00**	**2.006.600,00**	**5,48**	**34.623.400,00**
	Belanja Honorarium PPTK	450.000,00		-	450.000,00

	Belanja Alat Tulis Kantor	165.300,00	83.600,00	50,57	81.700,00
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	296.800,00	258.500,00	87,10	38.300,00
	Belanja Bahan Komputer	546.900,00	434.500,00	79,45	112.400,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.360.000,00		-	4.360.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.460.000,00	1.230.000,00	50,00	1.230.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.351.000,00		-	28.351.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	**2.019.740.000,00**	**807.040.235,00**	**39,96**	**1.212.699.765,00**
	Belanja Honorarium PPTK	960.000,00		-	960.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.191.400,00	3.026.000,00	94,82	165.400,00
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	652.000,00	565.400,00	86,72	86.600,00
	Belanja Bahan Komputer	159.000,00	132.000,00	83,02	27.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		-	6.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator acara dan panitia	13.600.000,00		-	13.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00		-	7.600.000,00
	Belanja Jasa tenaga Pelayanan Umum	1.794.900.000,00	731.112.500,00	40,73	1.063.787.500,00
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	96.720.000,00	38.264.335,00	39,56	58.455.665,00
	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	2.861.424,00	1.126.878,00	39,38	1.734.546,00
	Belanja Premi Asuransi Kematian	71.538.576,00	28.173.122,00	39,38	43.365.454,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00		-	3.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.557.600,00	4.640.000,00	25,00	13.917.600,00

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	**124.314.000,00**	**14.780.000,00**	**11,89**	**109.534.000,00**
	Belanja Honorarium PPTK	690.000,00		-	690.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	5.046.500,00		-	5.046.500,00
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	296.200,00		-	296.200,00
	Belanja Bahan Komputer	53.000,00		-	53.000,00
	Belanja Alat /Bahan Perabot Kantor	1.302.000,00		-	1.302.000,00
	Belanja Alat/Bahan Perlengkapan Dinas	240.000,00		-	240.000,00
	Belanja Alat/Bahan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	5.580.000,00		-	5.580.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.445.000,00		-	15.445.000,00
	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator acara dan panitia	14.650.000,00		-	14.650.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00		-	6.950.000,00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00		-	3.000.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.550.000,00		-	19.550.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.486.900,00	2.460.000,00	54,83	2.026.900,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.774.400,00	12.320.000,00	44,36	15.454.400,00
	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	19.250.000,00		-	19.250.000,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	**61.380.000,00**	**6.660.000,00**	**10,85**	**54.720.000,00**
	Belanja Honorarium PPTK	600.000,00		-	600.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	2.466.000,00		-	2.466.000,00
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	581.000,00		-	581.000,00
	Belanja Bahan Komputer	53.000,00		-	53.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.680.000,00		-	3.680.000,00

	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00		-	5.850.000,00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00		-	3.000.000,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00		-	1.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.300.000,00	4.100.000,00	30,83	9.200.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.250.000,00	2.560.000,00	22,76	8.690.000,00
	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	19.600.000,00		-	19.600.000,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelengaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	**935.419.650,00**	**252.768.330,00**	**27,02**	**682.651.320,00**
	Belanja Honorarium PPTK	840.000,00		-	840.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	23.709.200,00	4.003.450,00	16,89	19.705.750,00
	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	3.674.200,00	996.600,00	27,12	2.677.600,00
	Belanja Bahan Komputer	1.002.500,00	478.500,00	47,73	524.000,00
	Belanja Alat /Bahan Perabot Kantor	2.728.700,00	991.000,00	36,32	1.737.700,00
	Belanja Alat/Bahan alat listrik	1.147.000,00	858.200,00	74,82	288.800,00
	Belanja Alat/Bahan Suvenir/cendera mata	57.404.000,00		-	57.404.000,00
	Belanja Persediaan utk diserahkan kepada Masyarkat	13.500.000,00		-	13.500.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.947.500,00	27.767.500,00	34,30	53.180.000,00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.000.000,00		-	18.000.000,00
	Belanja Pakaian Olahraga	20.250.000,00		-	20.250.000,00
	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator acara dan panitia	8.800.000,00		-	8.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.580.000,00		-	36.580.000,00
	Belanja Jasa tenaga administasi	177.450.000,00	73.825.000,00	41,60	103.625.000,00
	Belanja Jasa tenaga kebersihan	59.100.000,00	25.500.000,00	43,15	33.600.000,00

	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.650.000,00	3.150.000,00	41,18	4.500.000,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Khabar/Majalah	1.200.000,00	380.000,00	31,67	820.000,00
	Belanja Lembur	10.005.000,00		-	10.005.000,00
	Belanja Iuran Jaminan kesehatan	14.040.000,00	5.746.180,00	40,93	8.293.820,00
	Belanja Iuran Jaminan kecelakaan	415.368,00	169.224,00	40,74	246.144,00
	Belanja Iuran Jaminan kematian	10.384.632,00	4.230.776,00	40,74	6.153.856,00
	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.000.000,00		-	5.000.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00		-	6.000.000,00
	Belanja Sewa Bangunan terbuka	3.600.000,00		-	3.600.000,00
	Belanja Sewa Alat Musik	9.000.000,00		-	9.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Alat Penidngin	1.830.000,00		-	1.830.000,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.990.000,00		-	4.990.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	160.457.000,00	74.971.900,00	46,72	85.485.100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	121.114.550,00	29.700.000,00	24,52	91.414.550,00
	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	70.600.000,00		-	70.600.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	4.000.000,00		-	4.000.000,00
TOTAL JUMLAH		**9.233.180.165,00**	**3.350.398.295,00**	**36,29**	**5.882.781.870,00**

Adapun untuk realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 adalah sebesar 36,29% dengan nilai sebesar Rp. 3.350.389.295,00.

Dalam hal ini faktor penghambat realisasi keuangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka adalah kurangnya jumlah anggaran kas untuk triwulan 1 dan 2.

Sedangkan untuk tindak lanjut kedepannya adalah menggunakan anggaran pada triwulan 3 dan 4 semaksimal mungkin sehingga tidak ada penumpukan anggaran sisa di triwulan 4 sampai akhir masa penggunaan anggaran.

Berikut dilampirkan plafon anggaran perubahan sebelum asistensi oleh Bappeda Kabupaten Bangka :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			4.675.417.715,00			4.976.128.445,00	300.710.730,00	
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	28,15		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	28,15			
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam	11,50		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam	11,50			

		AKIP Perangkat Daerah			**AKIP Perangkat Daerah**				
2.13.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**100**	**32.336.500,00**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**100**	**32.336.500,00**	**-**	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	**100**		**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**100**			
2.13.01.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*7 Dokumen*	*15.710.100,00*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dok)*	*7 Dokumen*	*15.710.100,00*	*-*	
2.13.01.2.01.06	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*20 Dokumen*	*16.626.400,00*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun (laporan)*	*20 Dokumen*	*16.626.400,00*	*-*	
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	**0,00**		**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**			

2.13.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**100%**	**3.549.437.300,00**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**100%**	**3.549.437.300,00**	-	
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	**100%**		**Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar**	**100%**			
2.13.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*12 Bulan*	*3.549.437.300,00*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*12 Bulan*	*3.549.437.300,00*	-	
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	*7 Dokumen*		*Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun*	*7 Dokumen*			
		Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	**64,56**		**Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah**	**64,56**			
2.13.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**18,75**	**9.800.000,00**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**18,75**	**9.800.000,00**	-	

		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	**100**		**Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu**	**100**			
		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	**100**		**Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik**	**100**			
2.13.01.2.05.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*16 stel*	*9.800.000,00*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*16 stel*	*9.800.000,00*	*-*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	**1,75**		**Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah**	**1,75**			
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	**60,00**		**Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur**	**60,00**			
2.13.01.2.06.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**196.562.565,00**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**425.168.565,00**	**228.606.000,00**	
2.13.01.2.06.09	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*12 Bulan*	*17.890.000,00*	*Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*12 Bulan*	*17.890.000,00*	*-*	
		Jumlah layanan Rapat-Rapat	*12 Bulan*	*178.672.56*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat*	*12 Bulan*	*334.378.565*	*155.706.000,00*	*Penambahan Belanja*

		Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani		*5,00*	*Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani*		*,00*		*Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi keluar Daerah*
2.13.01.2.07.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**20,00**	**-**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**20,00**	**36.450.000,00**	*36.450.000,00*	
2.13.01.2.07.06	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)*	*0*	*-*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)*	*1 Paket*	*36.450.000,00*	*36.450.000,00*	*Penambahan Belanja Pengadaan Peralatan Mesin Berupa Belanja Modal Komputer*
		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)	*0,00*		*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)*	*0,00*			
2.13.01.2.08.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**100%**	**676.951.350,00**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**100%**	**712.591.800,00**	35.640.450,00	
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	**3 Layanan**		**Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi**	**3 Layanan**			

2.13.01.2.08.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*12 Bulan*	*535.702.750,00*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*12 Bulan*	*585.450.000,00*	*49.747.250,00*	*Penambahan kekurangan iuran BPJS Tenaga Kontrak*
2.13.01.2.08.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*12 Bulan*	*101.791.800,00*	*Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*12 Bulan*	*101.791.800,00*	-	
2.13.01.2.08.04	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani*	*12 Bulan*	*39.456.800,00*	*Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani*	*12 Bulan*	*25.350.000,00*	*-14.106.800,00*	*Penambahan kekurangan iuran BPJS Tenaga Kontrak*
2.13.01.2.09.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**60,00%**	**210.330.000,00**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**60,00%**	**210.344.280,00**	14.280,00	
2.13.01.2.09.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara*	*3 Unit*	*135.000.000,00*	*Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara*	*3 Unit*	*135.014.280,00*	*14.280,00*	*Penambahan kekurangan iuran BPJS Tenaga Kontrak*
2.13.01.2.09.033	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa*	*Jumlah layanan Jasa Tenaga*	*12 Bulan*	*53.100.000,*	*Jumlah layanan Jasa Tenaga*	*12 Bulan*	*53.100.000,*		

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Supir yang tertangani*		*00*	*Supir yang tertangani*		*00*		
2.13.01.2.09.06	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara*	*1 Paket*	*7.230.000,00*	*Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara*	*1 Paket*	*7.230.000,00*	-	
2.13.01.2.09.09	*Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*1 Unit*	*15.000.000,00*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*1 Unit*	*15.000.000,00*	-	
2.13.02.2.	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**114.306.000,00**			**114.306.000,00**	**-**	
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi yang baik	**100,00**		**Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi yang baik**	**100,00**			
2.13.02.2.01.	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase Desa yang tertata dengan Baik (%)**	**80,00**	**114.306.000,00**	**Persentase Desa yang tertata dengan Baik (%)**	**80,00**	**114.306.000,00**	**-**	
2.13.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan,*	*Jumlah Desa yang batasnya ditetapkan*	*10 Desa*	*114.306.000,00*	*Jumlah Desa yang batasnya ditetapkan*	*10 Desa*	*114.306.000,00*	-	
		Jumlah	*0,00*		*Jumlah*	*0,00*			

	dan Perubahan Status Desa	*Desa/Lingkungan yang dimekarkan*			*Desa/Lingkungan yang dimekarkan*				
2.13.04.2.	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**1.443.386.800,00**			**1.443.386.800,00**	**-**	
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	**100**		**Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel**	**100**			
2.13.04.2.01.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel**	**100%**	**1.443.386.800,00**	**Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel**	**100%**	**1.443.386.800,00**	**-**	
		Persentase Laporan Aset Desa yang Akuntabel	**50,00%**		**Persentase Laporan Aset Desa yang Akuntabel**	**50,00%**			
		Persentase Desa yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sesuai Ketentuan	**100%**		**Persentase Desa yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sesuai Ketentuan**	**100%**			
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan	**100%**		**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan**	**100%**			

		Kepala Desa dan BPD			**Kepala Desa dan BPD**				
		Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai baik	**50,00%**		**Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai baik**	**50,00%**			
		Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap dan up to date	**100%**		**Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap dan up to date**	**100%**			
2.13.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa*	*Jumlah Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun*	*2 Dokumen*	*1.181.346.700,00*	*Jumlah Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun*	*2 Dokumen*	*1.181.346.700,00*	-	
2.13.04.2.01.07	*Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa*	*Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi*	*62 Peraturan Desa*	*18.882.000,00*	*Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi*	*62 Peraturan Desa*	*18.882.000,00*	-	
2.13.04.2.01.08	*Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*	*Jumlah Pembinaan Unit Usaha Bersama*	*62 Desa*	*124.314.000,00*	*Jumlah Pembinaan Unit Usaha Bersama*	*62 Desa*	*124.314.000,00*	-	
2.13.04.2.01.11	*Sub Kegiatan Fasilitasi Profil*	*Jumlah Desa/Keluraha*	*62 Desa*	*18.440.000,*	*Jumlah Desa/Keluraha*	*62 Desa*	*18.440.000,*	-	

	Desa	*n yang menyusun profil desa/kelurahan (e-govern)*		*00*	*n yang menyusun profil desa/kelurahan (e-govern)*		*00*		
2.13.04.2.01.12	*Sub Kegiatan Pengelolaan Aset Desa*	*Jumlah Pembinaan Pengelolaan Aset Desa*	*31 Desa*	*37.689.100,00*	*Jumlah Pembinaan Pengelolaan Aset Desa*	*31 Desa*	*37.689.100,00*	*-*	
2.13.04.2.01.14	*Sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	*Jumlah Desa/Keluraha n terbaik*	*8 Desa*	*62.715.000,00*	*Jumlah Desa/Keluraha n terbaik*	*8 Desa*	*62.715.000,00*	*-*	
2.13.05.2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**3.053.169.650,00**			**3.175.769.650,00**	**122.600.000,00**	
		Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	**100,00**		**Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif**	**100,00**			
2.13.05.2.01.	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat**	**Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat**	**100%**	**3.053.169.650,00**	**Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat**	**100%**	**3.175.769.650,00**	**122.600.000,00**	
		Persentase Sarjana	**100%**		**Persentase Sarjana**	**100%**			

	Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Membangun Desa yang aktif**			**Membangun Desa yang aktif**				
		Persentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina	**100%**		**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina**	**100%**			
		Persentase PKK Desa/Kelurahan yang aktif	**100%**		**Persentase PKK Desa/Kelurahan yang aktif**	**100%**			
		Persentase BUMDesa yang aktif	**100%**		**Persentase BUMDesa yang aktif**	**100%**			
		Jumlah Desa yang memiliki unit Usaha Bersama	**62 Desa**		**Jumlah Desa yang memiliki unit Usaha Bersama**	**62 Desa**			
2.13.05.2.01.02	*Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan, Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarkatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat*	*62 Lembaga*	*36.630.000,00*	*Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat*	*62 Lembaga*	*36.630.000,00*	*-*	
2.13.05.2.01.03	*Sub Kegiatan Peningkatan*	*Jumlah Sarjana Membangun*	*62 Orang*	*2.019.740.0*	*Jumlah Sarjana Membangun*	*62 Orang*	*2.019.740.0*	*-*	

	Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Desa (SMD)*		*00,00*	*Desa (SMD)*		*00,00*		
2.13.05.2.01.04	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tetap Guna*	*Jumlah TTG (Teknologi Tepat Guna) yang Dilombakan*	*3 TTG*	*61.380.000,00*	*Jumlah TTG (Teknologi Tepat Guna) yang Dilombakan*	*3 TTG*	*61.380.000,00*	*-*	
2.13.05.2.01.05	*Sub Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)*	*Jumlah BBGRM*	*0,00*		*Jumlah BBGRM*	*0,00*			
2.13.05.2.01.06	*Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	*Jumlah Pembinaan PKK Desa /Kelurahan yang dilaksakan*	*81,00*	*935.419.650,00*	*Jumlah Pembinaan PKK Desa /Kelurahan yang dilaksakan*	*81,00*	*1.058.019.650,00*	*122.600.000,00*	*Penambahan Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan dan Belanja Perjalanan Dinas*
JUMLAH TOTAL				**9.286.280.165,00**			**9.709.590.895,00**	**423.310.730,00**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan II dan asumsi-asumsi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2022 maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja baik berupa penambahan atau pengurangan target kinerja, pergeseran output kegiatan, penyesuaian pagu indikatif baik berupa penambahan maupun pengurangan pagu indikatif dalam pelaksanaan Renja Dinpemdes Tahun 2022. Mengingat kebutuhan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tahun 2022 , maka pada Perubahan Renja Dinpemdes Kabupaten Bangka Tahun 2022 akan dilaksanakan penambahan pagu indikatif. Sehingga Dinpemdes Kabupaten Bangka melaksanakaan penyesuaian melalui penambahan pagu indikatif yang berimplikasi pada penambahan kegiatan, sub kegiatan .

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERUKURANG
1	Program	4	4	-
2	Kegiatan	8	9	1
3	Sub Kegiatan	22	23	1
4	Output Kegiatan	34	35	1

Kegiatan yang ditambahkan pada perubahan Renja Tahun 2022 adalah :

1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang ditambahkan pada perubahan Renja Tahun 2022 adalah :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output Kegiatan yang ditambahkan pada perubahan Renja Tahun 2022 adalah :

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)

Secara rinci, uraian program, kegiatan sub kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan Perubahan Rencana Kerja Dinpemdes Kabupaten Bangka Tahun 2022 setelah asistensi oleh Bapeda Kabupaten Bangka dapat terlihat pada tabel berikut ini :

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			4.675.417.715,00			5.166.128.445,00	490.710.730,00	

		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	**28,15**		**Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**28,15**			
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	**11,50**		**Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**11,50**			
2.13.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**100**	**32.336.500,00**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**100**	**92.336.500,00**	**60.000.000,00**	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	**100**		**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**100**			
2.13.01.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*7 Dokumen*	*15.710.100,00*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dok)*	*7 Dokumen*	*45.710.100,00*	*30.000.000,00*	
2.13.01.2.01.06	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*20 Dokumen*	*16.626.400,00*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun (laporan)*	*20 Dokumen*	*46.626.400,00*	*30.000.000,00*	

		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	**0,00**		**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**			
2.13.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**100%**	**3.549.437.300,00**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**100%**	**3.549.437.300,00**	-	
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	**100%**		**Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar**	**100%**			
2.13.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*12 Bulan*	*3.549.437.300,00*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*12 Bulan*	*3.549.437.300,00*	-	
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	*7 Dokumen*		*Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun*	*7 Dokumen*			
		Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	**64,56**		**Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah**	**64,56**			

2.13.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**18,75**	**9.800.000,00**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**18,75**	**19.800.000,00**	10.000.000,00	
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	**100**		**Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu**	**100**			
		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	**100**		**Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik**	**100**			
2.13.01.2.05.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*16 stel*	*9.800.000,00*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*16 stel*	*19.800.000,00*	*10.000.000,00*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	**1,75**		**Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah**	**1,75**			
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	**60,00**		**Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur**	**60,00**			
2.13.01.2.06.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**196.562.565,00**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**515.168.565,00**	**318.606.000,00**	

2.13.01.2.06.09	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*12 Bulan*	*17.890.000,00*	*Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*12 Bulan*	*17.890.000,00*	-	
		Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	*12 Bulan*	*178.672.565,00*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani*	*12 Bulan*	*364.378.565,00*	*185.706.000,00*	*Penambahan Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi keluar Daerah*
2.13.01.2.07.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**20,00**	**-**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**20,00**	**66.450.000,00**	*66.450.000,00*	
2.13.01.2.07.06	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)*	*0*	-	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)*	*1 Paket*	*66.450.000,00*	*66.450.000,00*	*Penambahan Belanja Pengadaan Peralatan Mesin Berupa Belanja Modal Komputer*
		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)	*0,00*		*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)*	*0,00*			
2.13.01.2.08.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**100%**	**676.951.350,00**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**100%**	**712.591.800,00**	35.640.450,00	

		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	**3 Layanan**		**Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi**	**3 Layanan**			
2.13.01.2.08.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*12 Bulan*	*535.702.750,00*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*12 Bulan*	*585.450.000,00*	*49.747.250,00*	*Penambahan kekurangan iuran BPJS Tenaga Kontrak*
2.13.01.2.08.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*12 Bulan*	*101.791.800,00*	*Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*12 Bulan*	*101.791.800,00*	-	
2.13.01.2.08.04	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani*	*12 Bulan*	*39.456.800,00*	*Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani*	*12 Bulan*	*25.350.000,00*	*- 14.106.800,00*	*Penambahan kekurangan iuran BPJS Tenaga Kontrak*
2.13.01.2.09.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**60,00%**	**210.330.000,00**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**60,00%**	**210.344.280,00**	14.280,00	
2.13.01.2.09.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara*	*3 Unit*	*135.000.000,00*	*Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara*	*3 Unit*	*135.014.280,00*	*14.280,00*	*Penambahan kekurangan iuran BPJS Tenaga Kontrak*

2.13.01.2.09.033	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah layanan Jasa Tenaga Supir yang tertangani*	*12 Bulan*	*53.100.000,00*	*Jumlah layanan Jasa Tenaga Supir yang tertangani*	*12 Bulan*	*53.100.000,00*		
2.13.01.2.09.06	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara*	*1 Paket*	*7.230.000,00*	*Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara*	*1 Paket*	*7.230.000,00*	-	
2.13.01.2.09.09	*Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*1 Unit*	*15.000.000,00*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*1 Unit*	*15.000.000,00*	-	
2.13.02.2.	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**114.306.000,00**			**114.306.000,00**	**-**	
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi yang baik	**100,00**		**Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi yang baik**	**100,00**			
2.13.02.2.01.	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase Desa yang tertata dengan Baik (%)**	**80,00**	**114.306.000,00**	**Persentase Desa yang tertata dengan Baik (%)**	**80,00**	**114.306.000,00**	**-**	
2.13.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan*	*Jumlah Desa yang batasnya ditetapkan*	*10 Desa*	*114.306.000,00*	*Jumlah Desa yang batasnya ditetapkan*	*10 Desa*	*114.306.000,00*	-	

	Perubahan Status Desa	*Jumlah Desa/Lingkungan yang dimekarkan*	*0,00*		*Jumlah Desa/Lingkungan yang dimekarkan*	*0,00*			
2.13.04.2.	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**1.443.386.800,00**			**1.443.386.800,00**	**-**	
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	**100**		**Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel**	**100**			
2.13.04.2.01.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel**	**100%**	**1.443.386.800,00**	**Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel**	**100%**	**1.443.386.800,00**	**-**	
		Persentase Laporan Aset Desa yang Akuntabel	**50,00%**		**Persentase Laporan Aset Desa yang Akuntabel**	**50,00%**			
		Persentase Desa yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sesuai Ketentuan	**100%**		**Persentase Desa yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sesuai Ketentuan**	**100%**			
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD	**100%**		**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD**	**100%**			

		Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai baik	**50,00%**		**Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai baik**	**50,00%**			
		Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap dan up to date	**100%**		**Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap dan up to date**	**100%**			
2.13.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa*	*Jumlah Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun*	*2 Dokumen*	*1.181.346.700,00*	*Jumlah Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun*	*2 Dokumen*	*1.181.346.700,00*	-	
2.13.04.2.01.07	*Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa*	*Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi*	*62 Peraturan Desa*	*18.882.000,00*	*Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi*	*62 Peraturan Desa*	*18.882.000,00*	-	
2.13.04.2.01.08	*Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*	*Jumlah Pembinaan Unit Usaha Bersama*	*62 Desa*	*124.314.000,00*	*Jumlah Pembinaan Unit Usaha Bersama*	*62 Desa*	*124.314.000,00*	-	
2.13.04.2.01.11	*Sub Kegiatan Fasilitasi Profil Desa*	*Jumlah Desa/Kelurahan yang menyusun profil desa/kelurahan (e-govern)*	*62 Desa*	*18.440.000,00*	*Jumlah Desa/Keluraha n yang menyusun profil desa/keluraha n (e-govern)*	*62 Desa*	*18.440.000,00*	-	

2.13.04.2.01.12	*Sub Kegiatan Pengelolaan Aset Desa*	*Jumlah Pembinaan Pengelolaan Aset Desa*	*31 Desa*	*37.689.100,00*	*Jumlah Pembinaan Pengelolaan Aset Desa*	*31 Desa*	*37.689.100,00*	*-*	
2.13.04.2.01.14	*Sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	*Jumlah Desa/Kelurahan terbaik*	*8 Desa*	*62.715.000,00*	*Jumlah Desa/Kelurahan terbaik*	*8 Desa*	*62.715.000,00*	*-*	
2.13.05.2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**3.053.169.650,00**			**3.175.769.650,00**	**122.600.000,00**	
		Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	**100,00**		**Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif**	**100,00**			
2.13.05.2.01.	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya**	**Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat**	**100%**	**3.053.169.650,00**	**Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat**	**100%**	**3.175.769.650,00**	**122.600.000,00**	
		Persentase Sarjana Membangun Desa yang aktif	**100%**		**Persentase Sarjana Membangun Desa yang aktif**	**100%**			
		Persentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina	**100%**		**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina**	**100%**			

	Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PKK Desa/Keluraha n yang aktif**	**100%**		**Persentase PKK Desa/Kelurah an yang aktif**	**100%**			
		Persentase BUMDesa yang aktif	**100%**		**Persentase BUMDesa yang aktif**	**100%**			
		Jumlah Desa yang memiliki unit Usaha Bersama	**62 Desa**		**Jumlah Desa yang memiliki unit Usaha Bersama**	**62 Desa**			
2.13.05.2.01.02	*Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan, Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarkatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat*	*62 Lembaga*	*36.630.000,00*	*Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat*	*62 Lembaga*	*36.630.000,00*	*-*	
2.13.05.2.01.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posya ndu,LPM dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Jumlah Sarjana Membangun Desa (SMD)*	*62 Orang*	*2.019.740.000,00*	*Jumlah Sarjana Membangun Desa (SMD)*	*62 Orang*	*2.019.740.000,00*	*-*	

2.13.05.2.01.04	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tetap Guna*	*Jumlah TTG (Teknologi Tepat Guna) yang Dilombakan*	*3 TTG*	*61.380.000,00*	*Jumlah TTG (Teknologi Tepat Guna) yang Dilombakan*	*3 TTG*	*61.380.000,00*	*-*	
2.13.05.2.01.05	*Sub Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)*	*Jumlah BBGRM*	*0,00*		*Jumlah BBGRM*	*0,00*			
2.13.05.2.01.06	*Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	*Jumlah Pembinaan PKK Desa /Kelurahan yang dilaksakan*	*81,00*	*935.419.650,00*	*Jumlah Pembinaan PKK Desa /Kelurahan yang dilaksakan*	*81,00*	*1.058.019.650,00*	*122.600.000,00*	*Penambahan Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan dan Belanja Perjalanan Dinas*
JUMLAH TOTAL				**9.286.280.165,00**			**9.899.590.895,00**	**613.310.730,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2022 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efektivitas dan efesiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Lingkup Dinpemdes Kabupaten Bangka Tahun 2022. Diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinpemdes Tahun 2022 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur Dinpemdes dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungis masing-masing..

Sungailiat, Juni 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bangka,

Drs. M. DALYAN AMRIE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198603 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Diponegoro Nomor 3 dan 5 Sungailiat
Kode Pos 33215 – Telepon (0717) 92251 Faks : (0717) 92561
E-mail : Website : http///www.dinpemdes.bangka.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA
NOMOR :188.45/ 277 /DINPEMDES/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); (diambil dari RPJMD) (sama dengan nomor 6)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PErubahan KEdua Atas Peraturan Menetri Dalam Negri Nomr 13 Tahun 2006 tentang PEdoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk :

a. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2022;
b. Menyusun Rancangan Awal RENJA, Rancangan RENJA dan Rancangan Akhir RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka;
c. Melaksanakan penyelarasan program dan Kegiatan dengan komponen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka dan;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Juni 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA,

Drs. M. DALYAN AMRIE
NIP. 19670427 198603 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.95/277/DINPEMDES/2022
TANGGAL : 08 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi
		Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa
		Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa
4	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
5	Anggota	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna
		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa
		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Partisipasi Budaya Masyarakat Dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi Keuangan Desa
		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi Aset Desa
		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Pengadaan Barang/Jasa Desa
		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi Adaministrasi Desa
		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa
		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi Penataan Desa

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA,

Drs. M. DALYAN AMRIE
NIP. 19670427 198603 1 002